

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang  
©2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 .....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang .....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang .....	II-15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Pemalang .....	II-16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-25
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat .....	II-35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD KABUPATEN PEMALANG .....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Kabupaten Pemalang .....	III-1
A. Tujuan .....	III-2
B. Sasaran .....	III-2
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD KABUPATEN PEMALANG .....	IV-1
BAB V PENUTUP .....	V-1
5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian .....	V-1
5.2. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan .....	V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	V-1

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2023 .....	II-3
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang dan Pencapaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang .....	II-7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang .....	II-15
Tabel 2.4	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023 .....	II-17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 .....	II-18
Tabel 2.6	Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi BKD Kabupaten Pemalang .....	II-19
Tabel 2.7	Strategi dan Arah Kebijakan BKD Kabupaten Pemalang .....	II-23
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 .....	II-26
Tabel 2.9	Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 .....	II-35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 .....	III-1
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	III-4
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan .....	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Aksi Pengembangan SDM BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 .....	IV-10

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025 .....	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	I-3

# **“Y. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025”**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025. Renja BKD Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2025, BKD Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Renja BKD Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja BKD Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja BKD Kabupaten Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi BKD Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

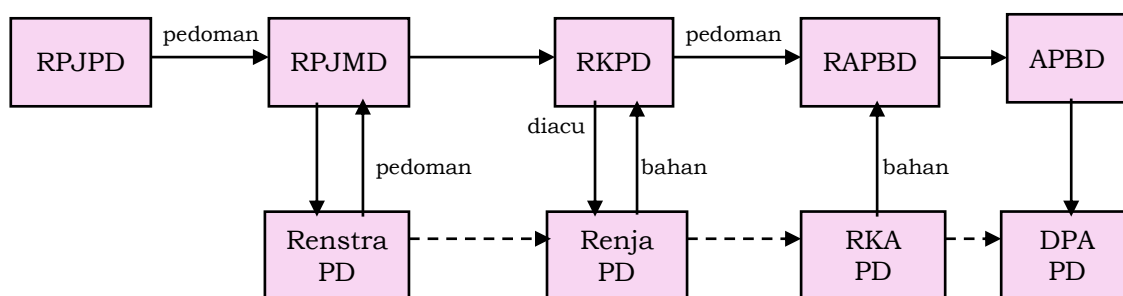
1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Tahun 2023, pengendalian kegiatan Tahun 2023, dan RKPD Tahun 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Bidang dan UPT di BKD Kabupaten Pemalang
  - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
  - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di BKD Kabupaten Pemalang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Melaksanakan FGD dengan mengundang : OPD di lingkungan Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025
  - Diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Pemalang
6. Penetapan
  - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Renja BKD Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025



Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja BKD Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja BKD Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Renja BKD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di BKD Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan capaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan BKD Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BKD Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKD Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2025 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbaikan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun adalah:

##### **A. Tujuan :**

Meningkatkan birokrasi kapabel

##### **B. Sasaran :**

1. Meningkatnya kompetensi ASN
2. Meningkatnya kinerja ASN
3. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN
4. Meningkatnya disiplin ASN

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di BKD Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 dan estimasi Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

##### Tahun Anggaran 2023

Jumlah anggaran BKD Kabupaten Pemalang sebesar Rp15.437.784.750,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp14.222.927.583,00 atau sebesar 92,13%.

##### Tahun Anggaran 2024 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan BKD Kabupaten Pemalang sebesar Rp14.381.387.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Sampai dengan Maret, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp2.131.845.957,00 atau sebesar 14,82%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2023, BKD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

a. Dari 9 indikator program yang ada, terdapat 3 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi, disebabkan di tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi
- 2) Persentase layanan administrasi kepegawaian, disebabkan layanan pemberian tanda jasa bagi pegawai tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena belum disusunnya aturan kabupaten sebagai payung hukum atas ketentuan terbaru

- 3) Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan, disebabkan belum tersedianya aplikasi yang dibutuhkan karena pengadaan yang tidak terlaksana akibat anggaran yang tersedia tidak mencukupi
- b. Dari 17 indikator kegiatan yang ada, terdapat 4 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :
- 1) Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan, disebabkan terdapat 4 barang milik daerah yang tidak dilaksanakan pengadaannya karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membeli barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
  - 2) Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, disebabkan terdapat 3 aset tetap yang dihapus dan 1 barang yang tidak dilaksanakan pengadaannya
  - 3) Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN, disebabkan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi ASN adalah dengan mengirimkan peserta diklat, pengiriman tersebut tidak dapat mencapai target karena pengiriman tergantung pada undangan diklat yang diterima BKD Kabupaten Pematang Jaya
  - 4) Jumlah dokumen proses izin perceraihan, penghargaan, tanda jasa, disebabkan layanan pemberian tanda jasa bagi pegawai tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena belum disusunnya aturan kabupaten sebagai payung hukum atas ketentuan terbaru
- c. Dari 37 indikator sub kegiatan yang ada, terdapat 7 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :
- 1) Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - 2) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - 3) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
  - 4) Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
  - 5) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
  - 6) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan Diklat
  - 7) Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa

Tabel 2.1

## Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2023

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	•Tercapainya nilai SAKIP sebesar 63,1 melebihi target •Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada	Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah sebanyak 45 paket sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 8 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 35 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 2 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 20 jasa sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 3 jasa sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 5 jasa sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 jasa sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar sebanyak 1 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 15 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian PPIK (pengadaan, pemberhentian ASN) sebesar 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN sebanyak 612 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 1 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian sebanyak 610 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen hasil pengelolaan informasi kepegawaian ASN sebanyak 7 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terlaksananya mutasi dan promosi ASN dengan keluaran pejabat pimpinan tinggi administrator dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya sebanyak 21,65% melebihi target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 5 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian MP (kenaikan pangkat) sebanyak 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 12 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 12 kegiatan	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target



<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>•Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN sebanyak 20,57% melebihi target</b> <b>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN sebanyak 288 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya assessment center sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>•Meningkatnya kualitas pendidikan ASN sebanyak 5,49% melebihi target</b> <b>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pendidikan lanjutan ASN sebanyak 3 orang sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebanyak 3 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>•Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN sebanyak 100% sesuai target</b> <b>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b>	<b>Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja ASN sebanyak 1 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>•Meningkatnya tingkat kedisiplinan ASN sebanyak 98,65% melebihi target</b> <b>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKD Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen hasil pembinaan ASN sebanyak 165 dokumen melebihi target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan melebihi target</b>
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN berupa pembinaan kepada 30 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 135 kegiatan melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya pelayanan proses izin perceraian pegawai sebanyak 20 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN sebanyak 2800 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

Berdasar tabel 2.1, terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2023 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan:

- 1.Komitmen pemimpin di BKD Kabupaten Pematang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
- 2.SDM dan sarana prasarana di BKD Kabupaten Pematang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

- 1.Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
- 2.Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja BKD Kabupaten Pematang;
- 3.Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
- 4.Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
- 5.Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait.

Masih terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga kedepan harus lebih cermat dalam menentukan target.



Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang dan Pencapaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP (nilai)	60,55	61,55	60,40	63,1	104,47	60,45	60,45	99,83
		IRB (indeks)	51,90	54,62	51,00	-	-	51,45	51,45	99,13
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	41	8	8	8	100	8	24	58,54
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	11	2	2	2	100	2	6	54,55
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)	144	26	26	26	100	26	78	54,17
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (dokumen)	4	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	5	1	1	1	100	1	3	60
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan (orang)	3	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (orang)	4	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	350	70	70	65	92,86	50	185	52,86
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	280	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah (paket)</b>	<b>360</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>30</b>
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan (paket)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>83,33</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>47,06</b>
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	8	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	15	4	24	20	83,33	8	32	213,33
5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (unit)	25	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)</b>	<b>240</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>45</b>
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	60	12	12	12	100	12	36	60
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit/tahun)</b>	<b>595</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>95,92</b>	<b>54</b>	<b>234</b>	<b>39,33</b>
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit/tahun)	200	33	40	38	95	0	71	35,5
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit/tahun)	200	35	40	38	95	36	109	54,5
5.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit/tahun)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit/tahun)	100	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit/tahun)	75	15	15	15	100	15	45	60	
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit/tahun)	5	0	0	0	0	0	0	0	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit/tahun)	10	2	2	2	100	2	6	60	
<b>5.03.02</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)</b>	<b>4</b>	<b>0,45</b>	<b>3,7</b>	<b>20,57</b>	<b>555,14</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>95</b>	
		<b>Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)</b>	<b>2</b>	<b>1,44</b>	<b>1,70</b>	<b>5,49</b>	<b>322,94</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>90</b>	
		<b>Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,70</b>	<b>21,65</b>	<b>1.273,53</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>90</b>
		<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)</b>	<b>100</b>	<b>82,29</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN (%)</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>75</b>	<b>98,65</b>	<b>131,53</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>88,89</b>
		<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) (dokumen)</b>	<b>2.040</b>	<b>428</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>100</b>	<b>616</b>	<b>1.656</b>
<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian (dokumen)</b>	<b>15</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>113,33</b>		
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	1	1	20	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	10	2	1	1	100	2	5	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian (dokumen)	2.000	425	610	610	100	610	1.645	82,25
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	1	1	20
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (lembaga/tahun)	10	0	0	0	0	1	1	10
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian (dokumen)	5	1	2	2	100	4	7	140
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian (dokumen)	5	1	1	1	100	4	6	120
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (laporan)	5	1	1	1	100	2	4	80
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (dokumen)</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>72</b>
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) (dokumen)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah (dokumen)	5	1	1	1	100	4	6	120
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN (dokumen)	10	2	2	2	100	6	10	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (dokumen)	20	4	4	4	100	4	12	60
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya (orang)</b>	<b>600</b>	<b>173</b>	<b>235</b>	<b>288</b>	<b>122,55</b>	<b>200</b>	<b>661</b>	<b>110,17</b>
		<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasinya (orang)</b>	<b>750</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	<b>26,67</b>
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan)</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>60</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>fungsional) (dokumen)</b>								
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (orang)	600	173	235	288	122,55	200	661	110,17
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan (orang)	750	122	3	3	100	75	200	26,67
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat (dokumen)	15	1	1	1	100	15	17	113,33
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN (orang)	75	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (dokumen)	20	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina (orang)	25	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir (orang)	20	0	0	0	0	40	40	200
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN (dokumen)	75	8	1	1	100	5	14	18,67
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai (orang)	3622	1010	570	620	108,77	2346	3976	109,77
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN (dokumen)	115	12	20	135	675	5	152	132,17
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	65	8	1	1	100	4	13	20
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	0	0	0	1	1	20
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan (orang)	3.000	947	400	457	114,25	2.306	3.710	123,67
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa (orang)	500	50	150	143	95,33	20	213	42,6
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (orang)	150	34	36	30	83,33	36	100	66,67
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (laporan)	100	12	20	135	675	4	151	151
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani (dokumen)	125	13	20	20	100	20	53	42,4
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN (laporan)	15	0	0	0	0	1	1	6,67



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	V	-	64,85	65,10	65,34	65,59	65,53	65,10	65,34	65,59	
2	Persentase kompetensi ASN	%	-	V	-	57,50	57,80	58,10	58,40	36,9	57,80	58,10	58,40	
3	Persentase kinerja ASN	%	-	V	-	80,30	80,30	80,30	80,30	83	80,30	80,30	80,30	
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	-	V	-	51,10	51,60	52,10	52,60	83,48	51,60	52,10	52,60	
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	-	V	-	99,7	99,7	99,7	99,7	100	99,7	99,7	99,7	
6	Nilai SAKIP	Nilai	-	-	-	60,40	60,45	60,50	60,55	63,1	60,45	60,50	60,55	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	51,00	51,45	51,80	51,90	-	51,45	51,80	51,90	Tahun 2023 tidak ada evaluasi dari Inspekt orat
8	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	-	-	-	3,70	3,80	3,90	4,00	20,57	3,80	3,90	4,00	
9	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	-	-	-	1,70	1,80	1,90	2,00	5,49	1,80	1,90	2,00	
10	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	-	-	-	1,70	1,80	1,90	2,00	21,65	1,80	1,90	2,00	
12	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	-	-	-	100	100	100	100	95	100	100	100	
13	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	-	-	-	100	100	100	100	80	100	100	100	
14	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	-	-	-	75	80	85	90	98,65	80	85	90	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Pemalang**

BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan fungsi BKD adalah perumusan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan kebijakan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jabatan dan penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan serta pengembangan aparatur; pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi penilaian kinerja BKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari :

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Persentase kompetensi ASN
- c. Persentase kinerja ASN
- d. Persentase tingkat pendidikan ASN
- e. Persentase tingkat kedisiplinan ASN
- f. Nilai SAKIP
- g. Indeks Reformasi Birokrasi
- h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
- i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
- j. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
- k. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
- l. Persentase layanan administrasi kepegawaian
- m. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
- n. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

BKD Kabupaten Pemalang harus berupaya meningkatkan kapabilitas birokrasi agar mencapai nilai optimal, dengan meningkatkan profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang. Tingkat profesionalitas ASN dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 65,53 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 64,85 sehingga tingkat capaiannya sebesar 101,05%.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2023 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih tinggi, dengan rincian di tahun 2022 IP ASN Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 54,46. Namun, di tahun 2023 dengan berbagai upaya perbaikan, Kabupaten Pemalang dapat mencapai nilai ASN yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 65,53.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi

dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Perbandingan IP ASN Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
Rata-rata		63,79	58,24	55,61	53,43	47,7	55,75	58,58	57,96

Sumber: IP ASN BKN, 2022 dan 2023

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN Provinsi Jawa Tengah serta rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori “rendah”, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan.

Dimensi yang pertama yaitu Kompetensi yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 36,9% tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 57,50% sehingga tingkat capaiannya sebesar 64,17%. Hal ini disebabkan masih kurangnya ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi atau sudah mengikuti namun bukti dukung tidak diupload di Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Untuk meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 20,57% ASN telah meningkat kompetensinya. Sehingga perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan perlu dilaksanakan sosialisasi upload bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas di Simpeg.

Dimensi kedua yaitu Kinerja yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 83% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80,30% sehingga tingkat capaiannya sebesar 103,36%. Untuk meningkatkan kinerja ASN telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN melalui e-kinerja dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 100% ASN telah mengisi e-kinerja dan telah dievaluasi kinerjanya. Selain mengevaluasi kinerja ASN dilaksanakan juga evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dengan capaian di tahun 2023 sebanyak 21,65% pejabat.

Dimensi ketiga yaitu Kualifikasi yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 83,48% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 51,10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 163,36%. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN telah dilaksanakan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar dengan capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 5,49% ASN telah meningkat kualifikasi pendidikannya.

Dimensi keempat yaitu Kedisiplinan yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 100% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 99,7% sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,3%. Indikator ini diukur dari tingkat kehadiran berdasarkan absensi, sedangkan apabila diukur dari jumlah ASN yang

melakukan pelanggaran disiplin sehingga mendapatkan hukuman disiplin, tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2023 sebesar 98,65%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pelayanan pengadaan, pemberhentian, kenaikan pangkat, sertifikasi fungsional, diklat, pengembangan karir, pemberian tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Capaian terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di tahun 2023 sebesar 95% disebabkan terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh provinsi atau pusat sehingga BKD Kabupaten Pemalang hanya fasilitasi pengajuannya. Selanjutnya, dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian telah digunakan sistem kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan dikembangkan setiap saat. Di tahun 2023, capaian persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebesar 80% disebabkan masih ada sistem kepegawaian yang belum dikembangkan yaitu manajemen talenta.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2023, BKD Kabupaten Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 63,1 (kategori B) sedangkan untuk IRB tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM BKD Kabupaten Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Selanjutnya capaian dalam pengembangan SDM BKD Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Permasalahan
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.205.000	49.910.000	99,41	-
2	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	37.126.000	36.972.800	99,59	-
3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	677.271.100	668.196.212	98,66	-
4	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	1.766.474.482	1.506.728.054	85,29	-

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, BKD Kabupaten Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BKD Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.6  
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan  
Tupoksi BKD Kabupaten Pemalang

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Melaksanakan fungsi Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah	1)Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	1)Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1)Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD
	2)Belum optimalnya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	2)Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan	2)Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga
	3)Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja ASN	3)Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya	3)Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN
	4)Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang belum dievaluasi kinerjanya	4)Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tidak melengkapi data kepegawaian dan capaian kinerja	4)Adanya manajemen talenta dan sistem merit yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
	5)Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian	5)Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN	5)Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN
	6)Belum optimalnya sistem kepegawaian yang dikembangkan	6)Terdapat kebutuhan/ fitur baru yang harus termuat dalam sistem kepegawaian	6)Adanya pendampingan dari lembaga/ kementerian terkait
	7)Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN	7)Masih terdapat ASN yang melanggar aturan disiplin ASN	7)Adanya regulasi yang memuat sanksi bagi pelanggar disiplin ASN
	8)Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	8)Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis sampai level individu	8)Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait
	9)Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	9)Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	9)Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi BKD Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat

memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

### **Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

### **Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

### **Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

#### 1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

#### 2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

#### 3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



#### 4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKD Kabupaten Pemalang mendukung misi kedua yaitu **“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya birokrasi akuntabel, meningkatnya birokrasi kapabel dan meningkatnya pelayanan publik yang prima. BKD Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya birokrasi kapabel dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah **“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025, diarahkan pada **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Peningkatan implementasi Smart City.
- b. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
- c. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi.
- d. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa.
- e. Perlindungan, pelestarian, upaya pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah.
- f. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
- g. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar.
- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

BKD Kabupaten Pemalang mendukung prioritas pembangunan Peningkatan Reformasi Birokrasi, yaitu dengan meningkatkan profesionalitas ASN sehingga menjadi aparatur yang kapabel.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang adalah terbitnya peraturan baru terkait kepegawaian, diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Pemalang ke depan adalah:

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten sehingga sinergitas dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti perangkat daerah kabupaten, BKD Provinsi, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian sehingga memperlancar kegiatan kepegawaian;
3. Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

BKD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan kerja dengan lembaga profesi ASN, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, BKD Provinsi Jawa Tengah, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian/Lembaga. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKD Kabupaten Pemalang, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan BKD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi;
2. Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan;
3. Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya;
4. Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tidak melengkapi data kepegawaian dan capaian kinerja;
5. Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN;
6. Terdapat kebutuhan/ fitur baru yang harus termuat dalam sistem kepegawaian;
7. Masih terdapat ASN yang melanggar aturan disiplin ASN;
8. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis sampai level individu;
9. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BKD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD;
2. Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga;
3. Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN;
4. Adanya manajemen talenta dan sistem merit yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas;
5. Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN;
6. Adanya pendampingan dari lembaga/ kementerian terkait;



7. Adanya regulasi yang memuat sanksi bagi pelanggar disiplin ASN
8. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
9. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan BKD Kabupaten Pemalang, telaah visi, misi dan program unggulan Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Perlu ditingkatkannya profesionalitas ASN;
2. Perlu ditingkatkannya kompetensi ASN;
3. Perlu ditingkatkannya kinerja ASN;
4. Perlu ditingkatkannya kualifikasi pendidikan ASN; dan
5. Perlu ditingkatkannya kedisiplinan ASN.

Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Strategi dan Arah Kebijakan BKD Kabupaten Pemalang

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya birokrasi kapabel	Meningkatnya kompetensi ASN	1. Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	1.1. Merumuskan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1.2. Menyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1.3. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.4. Melaksanakan Evaluasi Pengadaan ASN 1.5. Merumuskan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 1.6. Melaksanakan Koordinasi Administrasi Pemberhentian 1.7. Melaksanakan Evaluasi Pemberhentian ASN 1.8. Memfasilitasi Lembaga Profesi ASN
		2. Penyediaan data kepegawaian	2.1. Melaksanakan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 2.2. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.3. Melaksanakan Pengelolaan Data Kepegawaian 2.4. Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	3.1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 3.2. Melaksanakan Pengelolaan Assessment Center 3.3. Mengelola Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 3.4. Melaksanakan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 3.5. Melaksanakan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 3.6. Melaksanakan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 3.7. Melaksanakan Evaluasi Diklat

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			<p>dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</p> <p>3.8.Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</p> <p>3.9.Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN</p> <p>3.10.Melaksanakan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional</p>
		4.Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)	<p>4.1.Melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN</p> <p>4.2.Melaksanakan Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional</p> <p>4.3.Melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN</p> <p>4.4.Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional</p>
	Meningkatnya kinerja ASN	1.Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	<p>1.1.Melaksanakan Pengelolaan Mutasi ASN</p> <p>1.2.Melaksanakan Pengelolaan Promosi ASN</p>
		2.Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat)	2.1.Melaksanakan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		3.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	<p>3.1.Menyusun Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <p>3.2.Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <p>3.3.Melaksanakan Evaluasi Hasil Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur</p>
		4.Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian (pemberian penghargaan, tanda jasa, ijin cerai)	<p>4.1.Melaksanakan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai</p> <p>4.2.Melaksanakan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai</p> <p>4.3.Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</p> <p>4.4.Melaksanakan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</p>
	Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	1.Peningkatan Kualitas Pendidikan ASN	1.1.Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	Meningkatnya disiplin ASN	1.Peningkatan Kedisiplinan ASN	<p>1.1.Melaksanakan Pembinaan Disiplin ASN</p> <p>1.2.Melaksanakan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</p> <p>1.3.Melaksanakan Evaluasi Disiplin ASN</p>

#### **2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja BKD Kabupaten Pematang. Renja BKD Kabupaten Pematang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif BKD Kabupaten Pematang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Material* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan BKD Kabupaten Pematang.

Tabel 2.8  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kepegawaian Daerah				14.381.387.450	Badan Kepegawaian Daerah				22.255.738.800	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				14.381.387.450	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				22.255.738.800	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.984.813.500	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12.084.813.500	
								Nilai SAKIP	60,50	7.528.485.000	
								Indeks Reformasi Birokrasi	51,80	4.556.328.500	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	40.000.000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	22.000.000	
2						Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	
3						Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	
4						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	
5						Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pematang Siantar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	4.000.000	
7						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pematang Siantar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	4.000.000	
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.488.485.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>7.488.485.000</b>	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	7.488.485.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	7.485.985.000	
2						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Pematang Siantar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>92.230.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>92.230.000</b>	
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pematang Siantar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	92.230.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pematang Siantar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 orang	92.230.000	
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>523.683.150</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>26 paket</b>	<b>523.683.150</b>	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pematang Siantar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pematang Siantar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	15.000.000	
2	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Pematang Siantar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	0	160.423.150	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Pematang Siantar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	160.423.150	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 paket	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	25.000.000	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 dokumen	16.750.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	16.750.000	
5	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pemalang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 laporan	2.767.500	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pemalang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	2.767.500	
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 laporan	303.742.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	303.742.500	
<b>E</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>100.681.104</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>18 unit</b>	<b>180.681.104</b>	
1						Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	80.000.000	
2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	100.681.104	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 unit	100.681.104	
<b>F</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>343.548.000</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>36 laporan</b>	<b>343.548.000</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 laporan	2.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.500.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	200.000.000	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	141.048.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	141.048.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>416.186.246</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>88 unit</b>	<b>3.416.186.246</b>	
1						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	90.000.000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	0 unit	143.019.246	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	53.019.246	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Kab. Pemalang	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	0 unit	30.150.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Kab. Pemalang	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	1 unit	30.150.000	
4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	139.908.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 unit	139.908.000	
5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 unit	103.109.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	3.103.109.000	
<b>II</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>				<b>5.396.573.950</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>				<b>10.170.925.300</b>	
								<b>Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>3,9%</b>		
								<b>Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya</b>	<b>1,9%</b>		
								<b>Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>		
								<b>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kerjanya</b>	<b>1,9%</b>		
								<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	100%		
								Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	85%		
<b>A</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>1.673.879.300</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>1.692.107.300</b>	
								Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	<b>553 dokumen</b>	<b>1.391.429.300</b>	
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	<b>5 dokumen</b>	<b>300.678.800</b>	
1	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	0 dokumen	1.000.000	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	1 dokumen	1.000.000	
2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	0 dokumen	285.000.000	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	285.000.000	
3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	0 dokumen	900.000.000	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	2 dokumen	890.100.800	
4	Evaluasi pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	0 dokumen	1.000.000						
5	Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	0 dokumen	336.000						
6	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	0 dokumen	185.328.500	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	550 dokumen	185.328.500	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Evaluasi pemberhentian ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	0 dokumen	336.000	Evaluasi pemberhentian ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	1 dokumen	20.000.000	
8	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	0 lembaga	100.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	10.000.000	
9	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	0 dokumen	100.000						
10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	0 dokumen	131.600.000	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	4 dokumen	131.600.000	
11	Pengelolaan data kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	0 dokumen	62.637.800	Pengelolaan data kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 dokumen	62.637.800	
12	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	0 dokumen	106.441.000	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	2 dokumen	106.441.000	
<b>B</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>974.157.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>1.040.657.000</b>	
								<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>9 dokumen</b>	<b>811.500.000</b>	
								<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>229.157.000</b>	
1	Pengelolaan mutasi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	0 dokumen	60.000.000	Pengelolaan mutasi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi	4 dokumen	97.500.000	
2	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	0 dokumen	200.157.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 dokumen	229.157.000	
3	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	0 dokumen	714.000.000	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Pematang Siantar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 dokumen	714.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>C</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>1.803.837.700</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>6.386.439.200</b>	
								<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>373 orang</b>	<b>6.027.439.200</b>	
								<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya</b>	<b>50 orang</b>	<b>95.000.000</b>	
								<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>264.000.000</b>	
1	Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	0 orang	70.000.000	Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	354 orang	5.494.243.200	
2	Pengelolaan assessment center	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	0 dokumen	300.000.000	Pengelolaan assessment center	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	1 dokumen	300.000.000	
3	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	0 dokumen	100.000						
4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	0 orang	95.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	50 orang	95.000.000	
5	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	0 dokumen	1.337.737.700	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	5 dokumen	151.859.500	
6	Fasilitasi sertifikasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi ASN	0 orang	100.000						
7	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	0 laporan	100.000						
8	Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	0 orang	100.000						
9	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	0 dokumen	100.000						

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional ASN	0 orang	100.000						
11	Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	0 dokumen	100.000						
12	Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	0 dokumen	100.000						
13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN fungsional yang dibina	0 orang	100.000	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN fungsional yang dibina	280 orang	81.336.500	
14	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	0 orang	100.000	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	19 orang	264.000.000	
15	Evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional	0 orang	100.000						
<b>D</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>944.699.950</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>1.051.721.800</b>	
								<b>Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>310.833.600</b>	
								<b>Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)</b>	<b>2326 orang</b>	<b>333.000.000</b>	
								<b>Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>407.888.200</b>	
1	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	0 dokumen	100.000	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen		
2	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	0 dokumen	290.833.600	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 dokumen	290.833.600	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan evaluasi kinerja aparatur	0 dokumen	100.000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	20.000.000	
4	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	0 orang	199.442.150	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	2306 orang	278.000.000	
5	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	0 orang	40.000.000	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	10 orang	40.000.000	
6	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	0 dokumen	336.000						
7	Pembinaan disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	0 orang	350.153.000	Pembinaan disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	400 orang	350.153.000	
8	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	0 laporan	51.735.200	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	4 laporan	51.735.200	
9	Pelayanan proses ijin perceraian pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	0 dokumen	11.000.000	Pelayanan proses ijin perceraian pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 dokumen	15.000.000	
10	Evaluasi disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	0 laporan	1.000.000	Evaluasi disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	1 laporan	6.000.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2025 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.9  
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat  
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan 2025 pada:

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energy, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusi dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang merupakan lima tahun terakhir RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”** dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan implementasi Smart City.
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi.
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa.
5. Perlindungan, pelestarian, upaya pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah.
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar.
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2025 Kabupaten Pemalang tersebut, BKD Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-2 yaitu peningkatan reformasi birokrasi.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Kabupaten Pemalang**

BKD Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah, maka BKD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah, BKD Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan dan sasaran daerah melalui manajemen ASN untuk meningkatkan profesionalitas ASN.

### A. Tujuan

Tujuan BKD Kabupaten Pemalang yang akan dicapai di tahun 2025, yaitu : **“Meningkatnya birokrasi kapabel”**, yaitu birokrasi yang memiliki kemampuan yang handal sehingga pelayanan yang dilakukan cepat dan tepat. Tujuan ini diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN.

### B. Sasaran

BKD Kabupaten Pemalang mempunyai 4 (empat) sasaran yang akan dicapai di tahun 2025, yaitu :

1. **“Meningkatnya kompetensi ASN”** yang diukur dengan indikator **persentase kompetensi ASN** yang merupakan hasil konversi dari dimensi kompetensi IP ASN hasil penilaian dari BKN.
2. **“Meningkatnya kinerja ASN”** yang diukur dengan indikator **persentase kinerja ASN** yang merupakan hasil konversi dari dimensi kinerja IP ASN hasil penilaian dari BKN.
3. **“Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN”** yang diukur dengan indikator **persentase tingkat pendidikan ASN** yang merupakan hasil konversi dari dimensi kualifikasi IP ASN hasil penilaian dari BKN.
4. **“Meningkatnya disiplin ASN”** yang diukur dengan indikator **persentase tingkat kedisiplinan ASN** yang merupakan hasil konversi dari dimensi disiplin IP ASN hasil penilaian dari BKN.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya birokrasi kapabel		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,34
2		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase kompetensi ASN	%	58,10
3		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	80,30
4		Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	52,10
5		Meningkatnya disiplin ASN	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	99,7



### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Pada tahun 2025, BKD Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 2 program, 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah BKD Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp13.722.843.450 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03	KEPEGAWAIAN					13.722.843.450				22.578579.700
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Kab Pemalang	65,34		DAU		65,59	
		Persentase kompetensi ASN	%	Kab Pemalang	58,10		DAU		58,40	
		Persentase kinerja ASN	%	Kab Pemalang	80,30		DAU		80,30	
		Persentase tingkat pendidikan ASN	%	Kab Pemalang	52,10		DAU		52,60	
		Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	Kab Pemalang	99,7		DAU		99,7	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.218.363.450				12.168.500.000
		Nilai SAKIP	Nilai	Kab Pemalang	60,50		DAU		60,55	
		IRB	Indeks	Kab Pemalang	51,80		DAU		51,90	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	Kab Pemalang	9	47.409.000	DAU		8	52.000.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	Kab Pemalang	3	20.791.000	DAU		2	25.000.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kab Pemalang	1	1.975.000	DAU		1	4.000.000
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	Kab Pemalang	1	1.975.000	DAU		1	4.000.000
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	Kab Pemalang	1	1.975.000	DAU		1	4.000.000
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	Kab Pemalang	1	1.975.000	DAU		1	4.000.000
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	Kab Pemalang	1	8.094.000	DAU		1	5.500.000
5.03.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	Kab Pemalang	1	10.624.000	DAU		1	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>1</b>	<b>6.831.746.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1</b>	<b>7.504.000.000</b>
5.03.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Kab Pemalang	45	6.829.941.000	DAU		45	7.500.000.000
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	Kab Pemalang	1	1.805.000	DAU		1	4.000.000
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>1</b>	<b>94.458.500</b>	<b>DAU</b>		<b>1</b>	<b>95.000.000</b>
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	Kab Pemalang	45	94.458.500	DAU		45	95.000.000
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>paket</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>26</b>	<b>526.375.450</b>	<b>DAU</b>		<b>26</b>	<b>542.500.000</b>
5.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	Kab Pemalang	12	14.992.500	DAU		12	17.500.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	paket	Kab Pemalang	12	170.043.900	DAU		12	175.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	Kab Pemalang	2	25.089.050	DAU		2	27.500.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	Kab Pemalang	4	20.010.000	DAU		12	17.500.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	Kab Pemalang	5	6.095.000	DAU		5	5.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Kab Pemalang	12	290.145.000	DAU		12	300.000.000
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>4</b>	<b>35.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10</b>	<b>150.000.000</b>
5.03.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	Kab Pemalang	4	35.000.000	DAU		10	150.000.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>36</b>	<b>343.151.000</b>	<b>DAU</b>		<b>36</b>	<b>380.000.000</b>
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	Kab Pemalang	12	4.375.000	DAU		12	5.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Kab Pemalang	12	213.400.000	DAU		12	225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	Kab Pemalang	12	125.376.000	DAU		12	150.000.000
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>unit</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>88</b>	<b>340.223.500</b>	<b>DAU</b>		<b>56</b>	<b>3.445.000.000</b>
5.03.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	Kab Pemalang	8	120.362.500	DAU		8	100.000.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	Kab Pemalang	30	89.310.000	DAU		30	150.000.000
5.03.01.2.09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	unit	Kab Pemalang	1	29.958.000	DAU		1	45.000.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Kab Pemalang	47	46.590.000	DAU		15	150.000.000
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	Kab Pemalang	2	53.976.000	DAU		2	3.000.000.000.000
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>5.504.480.000</b>				<b>10.410.079.700</b>
		Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	Kab Pemalang	3,9		DAU		4,00	
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	Kab Pemalang	1,9		DAU		2,00	
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	Kab Pemalang	100		DAU		100	
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	Kab Pemalang	1,9		DAU		2,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	Kab Pemalang	100		DAU		100	
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	Kab Pemalang	100		DAU		100	
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	Kab Pemalang	85		DAU		90	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>700.000.000</b>				<b>1.780.000.000</b>
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN).	dokumen	Kab Pemalang	553		DAU		553	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<b>Selanjutnya</b>								
		<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian</b>	<b>dokumen</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>5</b>		<b>DAU</b>		<b>5</b>	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	Kab Pemalang	1	47.212.400	DAU		1	300.000.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	dokumen	Kab Pemalang	2	173.834.700	DAU		2	925.000.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	Kab Pemalang	550	80.282.000	DAU		550	200.000.000
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	Kab Pemalang	1	21.290.000	DAU		1	10.000.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	Kab Pemalang	4	135.648.000	DAU		4	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	Kab Pemalang	1	109.533.000	DAU		1	75.000.000
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	dokumen	Kab Pemalang	2	132.199.900	DAU		2	120.000.000
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					<b>850.000.000</b>				<b>1.052.500.000</b>
		<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>dokumen</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>9</b>		<b>DAU</b>		<b>9</b>	
		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)</b>	<b>dokumen</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>6</b>		<b>DAU</b>		<b>6</b>	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	dokumen	Kab Pemalang	4	63.630.000	DAU		4	97.500.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	dokumen	Kab Pemalang	6	194.656.000	DAU		6	230.000.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	Kab Pemalang	5	591.714.000	DAU		4	725.000.000
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>3.354.480.000</b>				<b>6.424.579.700</b>
		<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>orang</b>	<b>Kab Pemalang</b>	<b>373</b>		<b>DAU</b>		<b>1000</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	orang	Kab Pemalang	50		DAU		75	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)	dokumen	Kab Pemalang	19		DAU		25	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	Kab Pemalang	354	2.714.718.300	DAU		2293	5.494.243.200
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assessment center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	dokumen	Kab Pemalang	1	150.000.000	DAU		1	325.000.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	orang	Kab Pemalang	50	71.406.260	DAU		75	110.000.000
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	dokumen	Kab Pemalang	5	156.756.560	DAU		15	150.000.000
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	Kab Pemalang	280	119.708.880	DAU		75	81.336.500
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	orang	Kab Pemalang	19	141.890.000	DAU		25	264.000.000
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>600.000.000</b>				<b>1.153.000.000</b>
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	dokumen	Kab Pemalang	4		DAU		4	
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)	orang	Kab Pemalang	2326		DAU		2326	
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	dokumen	Kab Pemalang	2		DAU		2	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	Kab Pemalang	1	31.436.500			1	50.000.000
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	Kab Pemalang	4	105.351.900	DAU		4	300.000.000
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan evaluasi kinerja aparatur	laporan	Kab Pemalang	4	16.625.000	DAU		1	20.000.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	Kab Pemalang	2306	154.723.410	DAU		2306	278.000.000
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	Kab Pemalang	10	48.672.000	DAU		10	55.000.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	Kab Pemalang	400	123.817.000	DAU		600	375.000.000
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	Kab Pemalang	4	81.332.290	DAU		4	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan proses ijin perceraian pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	dokumen	Kab Pemalang	10	38.041.900	DAU		10	15.000.000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2025. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan BKD Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 60,50 dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 51,80, program ini dilakukan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 45 orang selama 12 bulan
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan peserta 45 orang
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah paket administrasi umum perangkat daerah sebanyak 26 paket, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 paket
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 paket
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 4 dokumen
  - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 5 kegiatan

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target capaian jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sebanyak 4 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 4 unit
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 36 laporan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sebanyak 88 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 8 unit
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 30 unit
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sebanyak 1 unit
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 47 unit
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 unit
- B. Program Kepegawaian Daerah dengan target capaian persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 3,9%; persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya sebanyak 1,9%; persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi sebanyak 100%; persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya sebanyak 1,9%; persentase layanan administrasi kepegawaian sebanyak 100%; persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebanyak 100%; dan persentase tingkat kedisiplinan ASN sebanyak 85%; program ini dilakukan melalui kegiatan :
  - 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target capaian jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) sebanyak 553 dokumen dan jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem dan data kepegawaian sebanyak 5 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebanyak 1 dokumen
    - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 2 kegiatan
    - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak sebanyak 550 dokumen
    - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN sebanyak 1 lembaga
    - e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 4 sistem

- f. Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 1 kegiatan
  - g. Evaluasi Data, Informasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target capaian jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) sebanyak 6 dokumen dan jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 9 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
- a. Pengelolaan Mutasi ASN sebanyak 4 kegiatan
  - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 6 periode
  - c. Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 5 kegiatan
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan target capaian jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikat, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional) sebanyak 19 dokumen, jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 373 orang dan jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya sebanyak 50 orang, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
- a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebanyak 354 orang
  - b. Pengelolaan Assessment Center selama 1 tahun
  - c. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebanyak 50 orang
  - d. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat sebanyak 5 kegiatan
  - e. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sebanyak 280 orang
  - f. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebanyak 19 orang
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target capaian jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai) sebanyak 2326 orang, jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 dokumen dan jumlah dokumen hasil pengelolaan disiplin ASN sebanyak 2 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
- a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 1 dokumen
  - b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 4 kegiatan
  - c. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 4 kegiatan
  - d. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebanyak 2306 orang
  - e. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai sebanyak 10 orang
  - f. Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 400 orang
  - g. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 4 orang
  - h. Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai sebanyak 10 orang

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya birokrasi kapabel			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,34	13.722.843.450	65,59	22.578.579.700	Kab. Pemalang
		Meningkatnya kompetensi ASN		Persentase kompetensi ASN	%	58,10		58,40		Kab. Pemalang
		Meningkatnya kinerja ASN		Persentase kinerja ASN	%	80,30		80,30		Kab. Pemalang
		Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN		Persentase tingkat pendidikan ASN	%	52,10		52,60		Kab. Pemalang
		Meningkatnya disiplin ASN		Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	99,7		99,7		Kab. Pemalang
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.218.363.450		12.168.500.000	
				Nilai SAKIP	Nilai	60,50		60,55		Kab. Pemalang
				IRB	Indeks	51,80		51,90		Kab. Pemalang
A			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	9	47.409.000	8	52.000.000	Kab. Pemalang
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	20.791.000	2	25.000.000	Kab. Pemalang
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1.975.000	1	4.000.000	Kab. Pemalang
3			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1.975.000	1	4.000.000	Kab. Pemalang
4			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1.975.000	1	4.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1.975.000	1	4.000.000	Kab. Pemalang
6			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	8.094.000	1	5.500.000	Kab. Pemalang
7			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	10.624.000	1	5.500.000	Kab. Pemalang
<b>B</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>6.831.746.000</b>	<b>1</b>	<b>7.504.000.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	45	6.829.941.000	45	7.500.000.000	Kab. Pemalang
2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1.805.000	1	4.000.000	Kab. Pemalang
<b>C</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>94.458.500</b>	<b>1</b>	<b>95.000.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	45	94.458.500	45	95.000.000	Kab. Pemalang
<b>D</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>paket</b>	<b>26</b>	<b>526.375.450</b>	<b>26</b>	<b>542.500.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	14.992.500	12	17.500.000	Kab. Pemalang
2			Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	paket	12	170.043.900	12	175.000.000	Kab. Pemalang
3			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	25.089.050	2	27.500.000	Kab. Pemalang
4			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	4	20.010.000	12	17.500.000	Kab. Pemalang
5			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	5	6.095.000	5	5.000.000	Kab. Pemalang
6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	290.145.000	12	300.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>E</b>			<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	<b>35.000.000</b>	<b>10</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	4	35.000.000	10	150.000.000	Kab. Pemalang
<b>F</b>			<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>36</b>	<b>343.151.000</b>	<b>36</b>	<b>380.000.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	4.375.000	12	5.000.000	Kab. Pemalang
2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	213.400.000	12	225.000.000	Kab. Pemalang
3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	125.376.000	12	150.000.000	Kab. Pemalang
<b>G</b>			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>unit</b>	<b>88</b>	<b>340.223.500</b>	<b>56</b>	<b>3.445.000.000</b>	<b>Kab. Pemalang</b>
1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	120.362.500	8	100.000.000	Kab. Pemalang
2			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	30	89.310.000	30	150.000.000	Kab. Pemalang
3			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	unit	1	29.958.000	1	45.000.000	Kab. Pemalang
4			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	47	46.590.000	15	150.000.000	Kab. Pemalang
5			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	53.976.000	2	3.000.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				5.504.480.000		10.410.079.700	
				Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,9		4,00		Kab. Pemalang
				Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya	%	1,9		2,00		Kab. Pemalang
				Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100		100		Kab. Pemalang
				Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,9		2,00		Kab. Pemalang
				Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100		100		Kab. Pemalang
				Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100		100		Kab. Pemalang
				Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	85		90		Kab. Pemalang
A			<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				700.000.000		1.780.000.000	
				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	dokumen	553		553		Kab. Pemalang
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	dokumen	5		5		Kab. Pemalang
1			Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	1	47.212.400	1	300.000.000	Kab. Pemalang
2			Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN	dokumen	2	173.834.700	2	925.000.000	Kab. Pemalang
3			Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	550	80.282.000	550	200.000.000	Kab. Pemalang
4			Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	1	21.290.000	1	10.000.000	Kab. Pemalang



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5			Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	4	135.648.000	4		Kab. Pemalang
6			Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	1	109.533.000	1	75.000.000	Kab. Pemalang
7			Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	dokumen	2	132.199.900	2	120.000.000	Kab. Pemalang
<b>B</b>			<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>850.000.000</b>		<b>1.052.500.000</b>	
				<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>dokumen</b>	<b>9</b>		<b>9</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
				<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)</b>	<b>dokumen</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
1			Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	dokumen	4	63.630.000	4	97.500.000	Kab. Pemalang
2			Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	dokumen	6	194.656.000	6	230.000.000	Kab. Pemalang
3			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	5	591.714.000	4	725.000.000	Kab. Pemalang
<b>C</b>			<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>3.354.480.000</b>		<b>6.424.579.700</b>	
				<b>Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>orang</b>	<b>373</b>		<b>1000</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
				<b>Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya</b>	<b>orang</b>	<b>50</b>		<b>75</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
				<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)</b>	<b>dokumen</b>	<b>19</b>		<b>25</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
1			Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	354	2.714.718.300	2293	5.494.243.200	Kab. Pemalang
2			Pengelolaan assessment center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	dokumen	1	150.000.000	1	325.000.000	Kab. Pemalang
3			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	orang	50	71.406.260	75	110.000.000	Kab. Pemalang
4			Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	dokumen	5	156.756.560	15	150.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 dan 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5			Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	280	119.708.880	75	81.336.500	Kab. Pemalang
6			Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	orang	19	141.890.000	25	264.000.000	Kab. Pemalang
<b>D</b>			<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>600.000.000</b>		<b>1.153.000.000</b>	
				<b>Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
				<b>Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)</b>	<b>orang</b>	<b>2326</b>		<b>2326</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
				<b>Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>Kab. Pemalang</b>
1			Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	1	31.436.500	1	50.000.000	
2			Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	4	105.351.900	4	300.000.000	Kab. Pemalang
3			Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan evaluasi kinerja aparatur	laporan	4	16.625.000	1	20.000.000	Kab. Pemalang
4			Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	2306	154.723.410	2306	278.000.000	Kab. Pemalang
5			Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	10	48.672.000	10	55.000.000	Kab. Pemalang
6			Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	400	123.817.000	600	375.000.000	Kab. Pemalang
7			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	4	81.332.290	4	60.000.000	Kab. Pemalang
8			Pelayanan proses ijin perceraian pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	dokumen	10	38.041.900	10	15.000.000	Kab. Pemalang

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Pengembangan SDM BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	45	94.458.500	ASN BKD Kabupaten Pemalang
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					
2	Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	354	2.714.718.300	ASN Kabupaten Pemalang
3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan	orang	50	71.406.260	ASN Kabupaten Pemalang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja tahun 2025 ini adalah :

1. Renja BKD Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dan RKPD tahun 2025.
2. Renja BKD Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang, UPT dan seluruh staf BKD Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025.

#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja BKD Kabupaten Pemalang tahun 2025.

Pemalang, 5 Juli 2024  
Kepala BKD Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 5 Juli 2024  
Kepala BKD Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003



**BERITA ACARA**  
**HASIL DESK PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2025 PADA PERANGKAT DAERAH RUMPUN BIDANG PPM**

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang


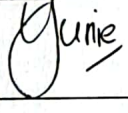
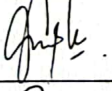

Hasil Desk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang PPM sebagai berikut :

**Bab 1**

1. Tambahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lampiran terdiri dari

1. SK Tim Penyusunan Renja 2025 (TTD Kepala Daerah)
2. Tambahkan checklist pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Kepala Daerah (TTD Kepala OPD)

Verifikator	TTD	OPD	TTD
1. Rizki Novitasari, S.I.Kom.,M.M.		1. Yunie Mastuti Handayani, S.Psi, M.Si.	
2. Handini Kartikasasmi, S.Pd			
3. Puspa Indah Purnaningrum,SE			
4. Cicik Nureliyanti, S.Stat.			
5. Slamet Rokhani			



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050 / 110 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28-2-2024

BUPATI PEMALANG,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 050/ 10 /TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Nurkholik, S.E.
9.	Analisis Kepegawaian Penyelia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Arief Warjito

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Mohammad Tarmanto
11.	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Teguh Leksono, S.M.
12.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Rokhidin, S.A.P.
13.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Rohwati, S.E., M.M.
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT



**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja**  
**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat		v	Tidak ada usulan dari masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota		v	Tidak melaksanakan forum perangkat daerah	
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		v	Tidak ada usulan hasil Musrenbang Kecamatan	
10b	Mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya	v			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	v			

Pemalang, 5 Juli 2024

Kepala BKD Kabupaten Pemalang


  
 -  
 EKO ADLSANTOSO, SH, M.Kn  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680908 199803 1 003